



Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik

Oligarchic Democracy and Democratic Recession in Post-Suharto Indonesia: A Historical Political Review

Ahmad Muhajir, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Indonesia
Febriyantika Wulandari*, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Langsa, Aceh, Indonesia

ABSTRACT

This article provides a systematic review of the literature concerning oligarchy in Indonesia, presenting a unique interpretation of the country's political transformations. The article results from a literature review with a historical approach. It posits three essential points from this literature. Firstly, it encourages contemplation on the mechanisms of authoritarian regime downfall. The conventional view attributes the fall of authoritarian regimes to the success of pro-democracy civil society mobilization. Although many Indonesian scholars subscribe to this perspective when explaining Suharto's regime downfall, the oligarchy literature proposes that the fall was primarily a result of tensions between Suharto and the oligarchs, leading them to eventually abandon him, rather than a simple rise in civil society forces. Secondly, the oligarchy perspective urges a reevaluation of Indonesia's emerging democracy. In contrast to the mainstream notion of democratization, which portrays the country as heading towards 'consolidation' and liberal democracy, the oligarchy literature perceives Indonesia's political transition as a journey towards a less liberal type of democracy, known as oligarchic democracy. Thirdly, Indonesia underwent a transition from an authoritarian political system to a democratic one, initially showing promising progress towards democratic consolidation. However, in the course of this process, a democratic regression occurred and emerging an oligarchic democracy.

ARTICLE HISTORY

Submitted 21/02/2023
Revised 18/03/2023
Accepted 11/04/2023
Published 20/04/2023

KEYWORDS

Oligarchy; political transition; democratization; oligarchic democracy; Indonesian political history.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

febriyantika.wd@iainlangsa.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1>.

PENDAHULUAN

Beberapa dekade telah berlalu sejak rezim Suharto tumbang, tetapi para akademisi masih memiliki pandangan yang beragam tentang penyebab kejatuhan dan sifat demokrasi baru di Indonesia. Dalam literatur utama mengenai demokratisasi, kejatuhan rezim otoriter sering dianggap sebagai hasil dari mobilisasi masyarakat sipil pro-demokrasi, dan demokratisasi dipandang sebagai peralihan dari otoritarianisme politik ke demokrasi liberal (Diamond, 1994; Webber, 2006; Linz & Stepan, 1996; Lane, 2008; Rueschemeyer et al., 1992). Pandangan ini menyatakan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menggoyahkan pemerintahan otoriter dan membangun sistem politik demokratis yang berkualitas (White, 2004). Peran masyarakat sipil dianggap sentral selama masa transisi dari rezim sultanistik seperti pada masa Suharto, karena transisi semacam itu didorong oleh kekuatan di luar negara (Bratton & Van de Walle, 1994).

Meskipun sistem pemilu telah berkembang sejak tahun 1998, namun tidak serta merta menghasilkan reformasi demokratis yang signifikan alih-alih lahirnya demokrasi liberal. Kontestasi politik tetap menggelar arena bagi persaingan kepentingan kelompok yang merugikan dan mengecilkan peran masyarakat sipil. Selain itu, kuasa uang dalam percaturan politik, dan tindakan-tindakan kekerasan dalam kontestasi politik tidak memudar sehingga dasar-dasar politik Indonesia hanya mengalami sedikit sekali perubahan. Para peneliti yang mengikuti pandangan *mainstream* tentang demokratisasi menyadari adanya kekurangan dalam demokrasi baru Indonesia, tetapi mereka masih optimis bahwa negara ini sedang dalam tahap 'konsolidasi' menuju demokrasi liberal. Karena itu, banyak analisis saat ini berusaha mengukur tingkat demokrasi liberal atau sejauh mana Indonesia telah mencapai konsolidasi demokratis.

Peneliti lain berpandangan bahwa meskipun ada reformasi-institusi yang penting, perubahan demokratisasi sebenarnya hanya sekadar permukaan, dan struktur kekuasaan inti tetap tidak berubah (Winters, 2011). Perubahan politik di Indonesia dengan menyoroti peran 'oligarki' yang mereka definisikan sebagai para aktor yang "menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat mereka gunakan untuk mempertahankan atau

meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi sosial eksklusif mereka" (Winters, [2011](#)). Di Indonesia, istilah oligarki mengacu pada aliansi penguasa dari elitis politik-birokratik yang telah mengumpulkan kekayaan pribadi melalui penyalahgunaan jabatan publik, dan elitis bisnis yang kesuksesannya banyak tergantung pada alokasi sumber daya negara. Menurut pandangan ini, kejatuhan Suharto lebih disebabkan oleh ketegangan antara Suharto dan para oligarki yang meninggalkannya. Selanjutnya, pandangan ini menyatakan bahwa para oligarki yang mengendalikan rezim Orde Baru berhasil bertahan selama transisi politik selama era Reformasi dan terus menggunakan negara untuk mencari keuntungan pribadi. Pandangan ini tidak menganggap kehadiran kekuasaan merugikan sebagai gejala pertumbuhan demokrasi liberal yang masih muda, melainkan sebagai bagian fundamental dari apa yang disebut sebagai 'demokrasi oligarkis'.

Riset ini mendukung dan melanjutkan dua poin hasil riset Yuki Fukuoka. Pertama, mempertimbangkan kembali cara-cara kejatuhan rezim otoriter. Kedua, meninjau ulang sifat demokrasi baru di Indonesia (Fukuoka, [2013](#)). Namun riset ini bertujuan untuk menawarkan poin yang ketiga, yaitu membuktikan sebuah fakta sejarah bahwa Indonesia sebenarnya telah mengalami transisi dari sistem politik otoriter menjadi demokratis, yang pada awalnya menunjukkan perkembangan menuju konsolidasi demokrasi. Sayangnya dalam proses tersebut, terjadi resesi demokratisasi yang membentuk demokrasi oligarkis. Poin ketiga ini mengadopsi pandangan-pandangan kritis dari Webber tentang istilah demokrasi oligarkis (Webber, [2006](#)). Artikel ini merupakan hasil riset terhadap literatur-literatur utama terkait oligarki di Indonesia dalam kurun 20 tahun terakhir (Robison & Hadiz, [2004](#); Webber, [2006](#); Chua, [2008](#); Warburton & Aspinall, [2018](#); [2018](#); Hadiz, [2010](#), [2017](#); Winters, [2011](#); Fukuoka, [2013](#); dan Power, [2018](#)) dan menggali bagaimana karya-karya tersebut membantu kita memahami lebih baik tentang perubahan politik di Indonesia dari perspektif sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhir Kekuasaan Suharto

Sejak Suharto jatuh dari kekuasaan, banyak penjelasan muncul untuk menggambarkan alasan dan proses bagaimana itu terjadi, banyak dari penjelasan tersebut menekankan peran oposisi masyarakat sipil terhadap rezimnya. Beberapa pandangan menyatakan bahwa transisi dari rezim sultanistik seperti Suharto "cenderung didorong sepenuhnya oleh kekuatan di luar negara, baik dari dalam masyarakat domestik maupun dari arena internasional" (Bratton & Van de Walle, [1994](#)). Rezim sultanistik, menurut Chehabi dan Linz, didasarkan pada penguasaan pribadi tetapi tanpa ideologi panduan yang jelas. Loyalitas kepada penguasa didorong oleh kombinasi rasa takut dan imbalan bagi para kolaboratornya (Chehabi & Linz [2000a](#)). Selain itu, penguasa menggunakan kekuasaannya tanpa batasan, atas kebijaksanaan pribadinya, dan tidak terikat oleh aturan atau ideologi. Salah satu ciri utama adalah penyatuan negara dan rezim, di mana norma-norma dan administrasi birokratis sering kali diabaikan demi keputusan-keputusan pribadi penguasa. Staf penguasa tidak berasal dari kalangan pejabat karier dengan kriteria seleksi terbuka, melainkan terselubung oleh praktik-praktik nepotisme, termasuk keluarga, teman, rekan bisnis, atau individu yang terlibat dalam kekerasan untuk mempertahankan rezim.

Rezim Suharto di Indonesia menunjukkan "kecenderungan sultanistik" yang kuat. Aspinall berpendapat bahwa pada pertengahan 1990-an, rezim Suharto mengalami "sultanisasi tahap akhir" di mana dominasi presiden, keluarga, dan lingkaran dalamnya semakin kuat dan meresap (Aspinall, [2005](#)). Rezim sultanistik dianggap mudah terpengaruh oleh transisi yang dipimpin oleh masyarakat karena tidak ada ruang bagi penguasa yang moderat yang akan membuka negosiasi publik mengenai kejatuhan dirinya (Linz & Stepan, [1996](#)). Aspinall setuju dengan pandangan ini dan menyatakan bahwa Suharto tidak hanya membatasi persaingan faksi dalam kalangan elitis rezim, tetapi juga menghentikan jalur aksi politik semi-independen: "tidak ada kelompok dalam elitis penguasa yang cukup mandiri untuk memulai demokratisasi atau bernegosiasi dengan kekuatan oposisi secara signifikan" (Aspinall, [2005](#)). Sebagai hasilnya, Aspinall menyimpulkan bahwa kejatuhan Suharto adalah hasil dari transisi yang dipimpin oleh masyarakat. Pandangan ini juga dipegang oleh banyak pengamat lainnya (Case, [2002](#); Hefner, [2000](#); Lane, [2008](#)).

Masyarakat sipil mengacu pada berbagai lembaga sosial dan asosiasi yang muncul dari perkembangan ekonomi, dengan pertumbuhan kelas menengah dan pekerja (Rueschemeyer et al., [1992](#)). Di Indonesia, Case menekankan bahwa perubahan mendasar terjadi di bawah rezim Suharto, dengan "ketidakpuasan baru dari kelas menengah dan pekerja yang menemukan ekspresi melalui kebangkitan Islam, aktivisme mahasiswa, militansi buruh, dan politik oposisi" (Case, [2002](#)). Sejak tahun 1980-an, ada pertumbuhan kehidupan asosiatif yang semakin terlihat (Aspinall, [2004](#); [2005](#); Uhlin, [1997](#)). Organisasi korporat yang sebelumnya pasif menjadi lebih berani dengan munculnya sektor organisasi non-pemerintah yang beragam dan aktif. Kelompok-kelompok yang sebelumnya tertindas, seperti pekerja industri dan

petani, juga mencoba mengorganisir diri (Aspinall, [2004](#)). Dianggap bahwa kekuatan masyarakat sipil inilah yang menjadi pendorong utama jatuhnya rezim Suharto. Lane berpendapat bahwa "Suharto tidak hanya jatuh dari kekuasaan - dia didorong oleh gerakan masyarakat dan gerakan itu sendiri terbentuk melalui usaha politik yang sulit, dengan menggerakkan massa orang dalam aksi" (Lane, [2008](#)).

Namun, perlu waspada terhadap porsi yang terlalu besar pada dampak masyarakat sipil dalam transisi politik tersebut. Sebagai contoh, kelas menengah dan pekerja – yang dianggap sebagai bagian dari masyarakat sipil – jumlahnya terlalu kecil, sehingga membuat Indonesia menjadi calon yang tidak mungkin untuk mengalami transisi demokratis (Mackie, [1999](#); Santoso, [1997](#)). Sebagaimana dicatat oleh Crouch, harapan umum pada saat itu adalah bahwa "Presiden Soeharto akhirnya akan digantikan oleh seorang jenderal lain yang memimpin rezim yang tidak jauh berbeda dengan Orde Baru" (Crouch, [2010](#)). Menariknya, para sarjana yang mengikuti pandangan utama tentang demokratisasi juga tampil inkonsisten dalam hal ini. Misalnya, Aspinall berpendapat bahwa jatuhnya rezim Suharto "melingkarkan pada kemenangan masyarakat sipil di Timur Tengah dan Eropa Tengah tahun 1989", namun juga mencatat bahwa "organisasi mapan yang menjadi bagian dari masyarakat sipil kebanyakan terlalu lemah untuk mengorganisir mobilisasi anti-rezim atau tidak cocok untuk peran ini" (Aspinall, [2004](#)). Jadi, perlu dicatat bahwa "kejatuhan rezim Suharto ditentukan bukan begitu banyak oleh proses dalam masyarakat sipil, tetapi oleh proses internal dalam negara". Oleh karena itu, asumsi umum bahwa jatuhnya rezim Suharto didorong oleh "kekuatan di luar negara" didasarkan pada bukti yang lemah (Fukuoka, [2013](#)).

Literatur tentang oligarki menantang fokus berlebihan pada peran masyarakat sipil. Misalnya, Robison dan Hadiz berpendapat bahwa akan salah jika kejatuhan Suharto diatribusikan sepenuhnya pada "politik jalanan" (Robinson & Hadiz, [2004](#)). Winters setuju dengan pandangan ini dan berpendapat bahwa "tidak akurat untuk menyebut demonstrasi, protes, dan kerusuhan sebagai gerakan. Tidak ada gerakan matang atau koheren yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, apalagi setelahnya" (Winters, [2011](#)). Para sarjana ini menekankan ketegangan yang semakin meningkat di antara para oligarki: antara Suharto dan sekutu-sekutu dekatnya di satu sisi, dan elite-elite lain yang kurang diuntungkan di sisi lain. Meskipun tidak sepenuhnya mengabaikan dampak mobilisasi sosial, Robison dan Hadiz menyatakan bahwa faktor lain yang sama pentingnya dalam perubahan rezim adalah "pengabaian Suharto oleh elemen-elemen kunci dalam rezimnya pada saat-saat kritis" (Robinson & Hadiz, [2004](#)). Setelah krisis ekonomi Asia 1997-1998, sekelompok elite yang mewakili kepentingan oligarki, khususnya menteri-menteri ekonomi dan pemimpin DPR/MPR seperti Harmoko, Sjarwan Hamid, dan Abdul Gafur, menarik dukungan mereka dari Suharto dan berperan sebagai kelompok yang mendukung penggulingannya.

Ketika posisi Suharto menjadi rapuh, sebagian dari oligarki yang pernah ia dukung, dan yang pernah ia lindungi dengan tegas dari kondisi bantuan IMF, memutuskan bahwa kelangsungan hidup mereka hanya bisa dijamin dengan bergabung dalam rezim baru dengan sekutu-sekutu baru. Dengan kata lain, Suharto menjadi tidak lagi diperlukan (Robison & Hadiz, [2004](#)). Winters menekankan faktor endogen dengan melihat bagaimana perilaku semakin kasar dari keluarga Suharto membuat sebagian besar oligarki merasa terasingkan. Dari perspektif oligarki, Winters berpendapat bahwa Suharto menjadi semakin terisolasi, dan saat krisis 1997, "pemisahan yang dalam menggantikan kesatuan dan koherensi di puncak, terutama antara Suharto dan aktor-aktor paling berpengaruh di Indonesia" (Winters, [2011](#)). Perlu diingat bahwa banyak dari mereka yang berpindah pihak dari Suharto terhubung, meskipun dengan longgar, dengan Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Mereka merasa terpinggirkan ketika anak-anak Suharto dan para pendukungnya menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan; mereka memiliki kepentingan bersama dalam menggulingkan Suharto. Beberapa di antara mereka memberikan dukungan taktis dan dukungan moral kepada para pengunjuk rasa. Jadi, mobilisasi kelompok sosial yang diinterpretasikan dalam pandangan utama sebagai gerakan "kekuatan rakyat" perlu dipahami dalam konteks pembelotan mantan pendukung setia Suharto. Jika Suharto mempertahankan siklus patronase yang stabil di antara para pendukungnya, maka pembelotan semacam itu akan terbatas (Fukuoka, [2013](#)).

Sulit untuk menilai seberapa besar pengaruh dari penyebab eksternal dan endogen dari disunitas elite, namun fokus pada disunitas rezim ini penting karena menunjukkan bahwa rezim Suharto memungkinkan lebih banyak pluralisme di kalangan elite rezim daripada sebuah rezim diktator standar, dan ada ruang bagi elite rezim yang tidak puas untuk mencari penggulingan 'sultan'. Seperti yang dikatakan Richard Snyder, klaim populer bahwa rezim sultanistik paling rentan terhadap transisi yang dipimpin oleh masyarakat didasarkan pada sekelompok kasus tertentu di mana rezim sultanistik digulingkan oleh revolusi, termasuk rezim sultanistik Shah Mohammad Reza Pahlavi di Iran, Anastasio Somoza Debayle di Nikaragua, dan Fulgencio Batista di Kuba (Snyder, [1998](#)). Dengan kata lain, pengabaian kasus-kasus

lain di mana elite rezim benar-benar berperan signifikan dalam kejatuhan rezim telah membatasi pemahaman kita tentang transisi dari rezim sultanistik, yang dapat berbeda-beda tergantung pada konteks politik lokal.

Literatur tentang oligarki mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kesetiaan elite rezim terhadap 'sultan' dapat dipandang sebagai 'variabel'. Memastikan stabilitas rezim membutuhkan mobilisasi dukungan politik yang berkelanjutan: 'sultan' mempertahankan kekuasaan dengan memberikan keuntungan pribadi yang menjamin loyalitas para pengikutnya. Logika dari hal ini adalah bahwa, setelah kehilangan dukungan dari 'sultan', sebagian dari mantan 'staf rumah tangga' dapat berpaling dari penguasa, mencari perubahan institusional. Yang lebih penting, literatur tentang oligarki menunjukkan bahwa elite rezim berpaling dari Suharto bukan semata-mata karena keyakinan demokratis, tetapi karena pertimbangan akses terhadap patronase. Bentuk transisi politik yang kurang liberal ini, yang didorong oleh proses internal rezim, sering diabaikan dalam literatur utama tentang demokratisasi. Dengan kata lain, literatur tentang oligarki menawarkan wawasan teoretis baru tentang mode alternatif transisi dari rezim sultanistik. Meskipun spesifikasi konsep baru tersebut melebihi cakupan artikel ini, literatur tentang oligarki menyarankan bahwa lebih banyak waktu dan upaya perlu diinvestasikan untuk mengeksplorasi implikasi pengalaman Indonesia dalam konteks teoretis yang lebih luas (Fukuoka, [2013](#)).

Selain menyajikan perspektif alternatif tentang jatuhnya Suharto, literatur tentang oligarki mendorong peninjauan ulang tentang sifat demokrasi baru di Indonesia yang telah dikonsolidasikan selama sekitar sepuluh tahun terakhir. Indonesia saat ini digambarkan dalam pandangan utama sebagai sedang dalam tahap konsolidasi, yang melibatkan penghapusan secara bertahap ketidakpastian yang mengelilingi transisi. Pada tahap ini, perkembangan masyarakat sipil dianggap krusial bagi pendirian dan pendalaman demokrasi liberal (Diamond, [1994](#)). Literatur tentang oligarki sekali lagi menantang konsepsi demokratisasi ini. Menurut Robison dan Hadiz, jatuhnya rezim Suharto adalah akibat dari langkah-langkah defensif yang diambil oleh para oligarki, yang kepentingannya semakin terancam karena ketidakmampuan Suharto mengatasi krisis ekonomi di Indonesia (Robinson & Hadiz, [2004](#)). Dengan kata lain, demokratisasi di Indonesia dapat dipahami sebagai sarana yang penting bagi kelangsungan hidup para oligarki, karena struktur institusional Orde Baru menjadi tidak layak. Oligarki ini, menurut argumen tersebut, berhasil menguasai reformasi pasca-Suharto dan mengorganisir ulang kepentingan mereka.

Oligarki dan Transisi Politik

Proses transisi politik dipengaruhi oleh tipe rezim sebelumnya, dan transisi dari rezim sultanistik selalu rumit. Ketika rezim sultanistik digantikan oleh demokrasi, Chehabi dan Linz ([2000b](#)) mencatat bahwa "kemungkinan besar demokrasi baru ini akan menampilkan kecenderungan klienelisme yang kuat, dengan para pemimpin yang terpilih secara demokratis menggunakan sumber daya kantor mereka untuk membangun hubungan patron-klien di seluruh negeri" (Chehabi & Linz, [2000b](#)). Pengamatan ini sepenuhnya berlaku untuk Indonesia pasca-Suharto. Meskipun pemilu semakin bebas dan adil setelah tahun 1998, kekuasaan tetap menjadi milik segelintir orang, dan sifat klienelisme dalam politik Indonesia menunjukkan lebih banyak kontinuitas daripada perubahan. Mereka yang melihat jatuhnya Suharto sebagai kemenangan oposisi masyarakat sipil kemudian merasa kecewa, karena kejatuhan rezim Orde Baru "tidak diikuti oleh munculnya gerakan dan organisasi yang mewakili kepentingan kelas bawah yang tetap terpinggirkan dari proses kontestasi politik" (Hadiz, [2003](#)).

Namun, banyak pengamat masih percaya bahwa demokrasi memiliki kapasitas untuk mendorong Indonesia menuju arah demokrasi liberal yang lebih baik. Asumsi dalam pendekatan ini adalah "bahkan demokrasi yang buruk lebih baik daripada pemerintahan otoriter atau kekacauan karena kita dapat menganggap bahwa mereka mungkin menjalani proses re-ekuilibrium, dan dengan kondisi dan kepemimpinan yang lebih baik, mereka dapat sepenuhnya terkonsolidasi" (Linz, [1997](#)). Ide bahwa ada transisi menjadi sesuatu yang selain demokrasi liberal agak hilang dalam diskusi. Seperti yang dicatat oleh Jamie Davidson ([2009](#)), dalam analisis semacam itu, beberapa frasa singkat seperti "kesinambungan yang berubah", "perubahan dan kesinambungan", "hasil campuran", "demokrasi berkualitas rendah", "berusaha mengatasi", "kebebasan namun defisit demokratis", dan "demokrasi patronase" diperkenalkan untuk menunjukkan kekurangan yang perlu diatasi dalam demokrasi baru Indonesia (Davidson, [2009](#)). Istilah-istilah seperti itu hanya masuk akal dalam hubungannya dengan ideal demokrasi. Terdapat penekanan yang mencolok pada analisis institusi dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi mereka dalam konteks demokrasi. Seperti yang dicatat oleh Garry Rodan dan Kanishka Jayasuriya, hal ini "tidak terlalu berbeda dari masalah teori modernisasi dan transisi sebelumnya yang didasarkan pada asumsi bahwa demokrasi liberal adalah rezim alami yang mendampingi perkembangan ekonomi dan sosial yang maju" (Rodan & Jayasuriya, [2006](#)).

Menantang tren populer ini, Robison dan Hadiz menyatakan bahwa pembentukan demokrasi baru di Indonesia sebagian besar menjadi urusan kepentingan-kepentingan yang bersifat pemangsaan yang pada dasarnya telah dipelihara dan diinkubasi di bawah rezim lama. Dengan perubahan yang mencolok, dikemukakan bahwa "oligarki pemerintahan otoriter sekarang menjadi oligarki politik uang yang tersebar dan bingung, karena jaringan patronase dan mekanisme untuk alokasi kekuasaan dan kekayaan publik diatur ulang dalam arena partai dan parlemen yang baru" (Robison dan Hadiz, [2004](#)). Dari perspektif ini, transisi politik hanya memfasilitasi reorganisasi hubungan kekuasaan yang telah diinkubasi dalam rezim Suharto, daripada perubahan mendasar dari hubungan tersebut. Robison dan Hadiz menantang asumsi bahwa keberadaan institusi formal demokrasi pada akhirnya akan membuka peluang baru bagi kekuatan pro-demokrasi yang sebelumnya marginal. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa demokratisasi gagal menghilangkan banyak fitur dasar yang telah menentukan politik Indonesia di bawah rezim lama, sehingga mencegah munculnya kekuatan liberal demokratis yang kohesif dalam era pasca-Suharto (Robinson & Hadiz, [2004](#)).

Poinnya adalah bahwa meskipun demokratisasi telah melibatkan dispersi kekuasaan politik, hal itu belum banyak mempengaruhi konsentrasi kekuasaan material di tangan para oligarki. Bahkan, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa oligarki adalah kompatibel dengan demokrasi formal. Robison dan Hadiz juga menekankan bahwa pengalaman Indonesia dapat dibandingkan dengan Filipina dan Thailand di mana para penguasa telah menguasai institusi formal demokrasi untuk mengejar pengayaan pribadi. Meskipun argumentasi mereka begitu meyakinkan, Robison dan Hadiz telah meninggalkan satu pertanyaan krusial yang belum terjawab, yaitu, mengapa jatuhnya rezim Suharto telah menyebabkan pengenalan demokrasi formal. Mereka berpendapat bahwa dengan jatuhnya Suharto, aparat pemerintahan yang otoriter dan terpusat tidak lagi dapat berkelanjutan karena "hal-hal telah terlalu jauh untuk ini". Namun, tidak ada hubungan mekanis antara reorganisasi kepentingan oligarki dan pengenalan institusi demokrasi (Robinson & Hadiz, [2004](#)). Pertanyaan ini telah dijawab oleh beberapa studi selanjutnya dalam literatur tentang oligarki yang menekankan pergeseran keseimbangan kekuasaan di antara oligarki, khususnya dari elite politik-birokrasi ke elite bisnis.

Demokrasi Oligarkis

Demi perubahan institusi berupa ekspansi politik pemilu, kehadiran aktor yang kepentingannya terlayani dengan fitur institusi demokrasi formal sangat penting. Dalam hal ini, beberapa penelitian lanjutan dalam literatur oligarki menekankan naiknya elite bisnis yang telah memiliki aset ekonomi independen dari negara namun masih membutuhkan akses ke patronase negara untuk kesuksesan bisnis mereka (Chua, [2008](#); Winters, [2011](#)). Meskipun pada era Suharto, kepentingan bisnis diatur oleh elite politik-birokrasi, ekspansi politik pemilu yang mahal telah memfasilitasi naiknya elite bisnis yang dapat menggunakan modal mereka untuk mencari posisi legislatif dan jabatan kabinet yang sebelumnya terbatas. Menghilangkan batasan yang membatasi bisnis, demokratisasi telah meningkatkan otonomi mereka dan mengubah hierarki lama dari hubungan negara-bisnis (Chua, [2008](#); Fukuoka, [2012a](#); [2012b](#)). Di Barat, naiknya bisnis independen dianggap telah memfasilitasi munculnya demokrasi liberal (Moore, [1967](#)). Di Indonesia, namun, demokrasi liberal tampaknya menjadi salah satu hasil yang paling tidak mungkin, karena banjirnya pengusaha ke arena politik lebih didorong oleh pertimbangan praktis tentang akses ke patronase daripada keyakinan demokratis.

Salah satu analisis sistematis pertama tentang perubahan hubungan negara-bisnis dalam era pasca-Suharto disajikan oleh Christian Chua ([2008](#)), yang memetakan evolusi bisnis besar Tionghoa di Indonesia. Chua berpendapat bahwa sementara kapitalis Tionghoa dikuasai oleh politikus-birokrat Orde Baru, reformasi periode Reformasi telah memfasilitasi munculnya plutokrasi di Indonesia, meningkatkan posisi mereka dalam hubungannya dengan politikus-birokrat. Ekspansi politik pemilu yang mahal menjadi krusial, karena telah memberikan situasi di mana modal menjadi kebutuhan, tanpa yang mana pencalonan untuk jabatan politik tidak terjangkau. Dalam konteks ini, bisnis besar Tionghoa menjadi patron yang paling dicari. Alih-alih menghilang di hadapan reformasi ekonomi neo-liberal, bisnis besar Tionghoa sekarang efektif mengendalikan masyarakat melalui plutokrasi: "oligarki di mana politikus-birokrat dan keluarga mereka cenderung mendominasi sekarang digantikan oleh satu yang terdiri dari mode lebih plutokratik – di mana bisnis besar cenderung memimpin pertunjukan dengan lebih terang-terangan" (Chua, [2008](#)). Meskipun poin utama Chua bahwa para taipan Tionghoa telah menjadi peserta biasa dalam politik dapat diperdebatkan (Tomsa, [2008](#)), poinnya mengenai kelangsungan hidup para taipan Tionghoa sedikit terlalu berlebihan. Meskipun demikian, Chua tentu benar dalam menekankan bahwa dalam Indonesia pasca-Suharto, uang adalah sumber paling vital dan hal ini telah memberi bisnis kesempatan strategis baru (Fukuoka, [2013](#)).

Winters berpendapat dengan cara yang sama bahwa demokratisasi telah mengendurkan kontrol yang dikenakan Suharto pada oligarki. "Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia" (Winters, [2011](#)), "politiknya lebih didominasi oleh oligarki daripada oleh elite yang terbelah". Meskipun definisi Winters tentang oligarki tidak harus terbatas pada elite bisnis, fokusnya pada "aktor yang dapat menggunakan sumber daya material dengan efek ekonomi penting" selaras dengan Chua. Perbedaan besar, bagaimanapun, adalah fokus penelitian Winters pada oligarki pribumi, bukan Tionghoa. Menurut Winters, oligarki Tionghoa lebih dibatasi daripada rekan pribuminya dalam cara mereka dapat menggunakan kekuatan material mereka. Sebagai gantinya, "pengucilan oligarki Tionghoa dari jabatan tinggi negara dan partai memberikan kepada oligarki pribumi lebih banyak peluang penggunaan dana mereka" (Winters, [2011](#)). Meskipun oligarki pribumi mengendalikan kekayaan lebih kecil daripada rekan Tionghoa mereka, mereka "memiliki monopoli pada peluang untuk melengkapi kekuatan materi mereka dengan dana yang dicuri langsung dari lembaga-lembaga negara" (Winters, [2011](#)). Keseimbangan kekuasaan dalam oligarki Indonesia berubah drastis setelah tahun 1998, karena pengangkatan Suharto meningkatkan kekuasaan oligarki pribumi (Fukuoka, [2013](#)).

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang sejauh mana elite bisnis Tionghoa telah menjadi peserta biasa dalam demokrasi baru Indonesia, baik Chua maupun Winters setuju bahwa banjirnya pengusaha ke arena politik lebih didorong oleh pertimbangan praktis tentang akses ke patronase daripada komitmen terhadap ideologi atau kebijakan tertentu. Faktanya, sulit untuk mengidentifikasi kenaikan kekuatan-kekuatan reformis berdasarkan platform kebijakan atau ideologi yang berbeda dalam proses pemilu. Sebagai gantinya, pemilu dilakukan antara pusat-pusat kepentingan yang sama-sama memperebutkan sumber daya yang sulit dibedakan dalam hal kebijakan. Hampir semua partai politik yang bersaing dalam pemilu ambigu tentang agenda reformasi masing-masing. Seperti yang dikemukakan Stephen Sherlock, tidak mungkin menentukan posisi partai dalam pernyataan filosofi, ideologi, atau kebijakan yang rinci karena 'tidak ada'. Meskipun banyak partai mengajukan 'program pertempuran' setelah pembentukan atau perombakan mereka pada tahun 1998, program-program tersebut 'tidak berisi apa-apa yang benar-benar membedakan mereka dari pesaing mereka dan tidak ada perubahan yang dibuat pada mereka sejak saat itu' (Sherlock, [2004](#)). Sebaliknya, yang menjadi perhatian partai politik adalah posisi Kabinet dan kursi di komisi parlemen, melalui mana mereka dapat mengeksploitasi kapasitas distribusi partikularistik negara.

Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa faktor ideologis, termasuk agama, tidak relevan lagi dalam politik Indonesia. Analisis Dwight King tentang pemilu 1999 mengungkapkan bahwa perpecahan sosial-agama pada tahun 1950-an tetap menjadi pengaruh kuat dalam sistem partai Indonesia pasca-Suharto (King, [2003](#)). Demikian pula, dalam melihat pemilu 2004, Anies Baswedan menyatakan bahwa perpindahan pemilih terjadi hampir secara eksklusif dalam blok-blok sosial-agama besar. Sulit untuk menolak relevansi yang terus-menerus dari aliran-aliran dalam menganalisis sistem partai (Baswedan, [2004](#)). Namun, ada bahaya dalam sekadar mentransfer kerangka analisis tahun 1950-an ke dalam politik Indonesia kontemporer karena telah ada beberapa perubahan signifikan yang tidak dapat dijangkau melalui lensa aliran-aliran. Faktanya, beberapa sarjana menunjukkan berkurangnya relevansi ideologi dalam politik partai Indonesia (Mietzner, [2008](#); Tomsa, [2008](#); Ufen, [2006](#)). Andreas Ufen mengatakan bahwa "politik aliran telah kehilangan banyak dari signifikansinya" di mana elite berkuasa dan kaya menggunakan partai sebagai kendaraan pribadi mereka untuk tujuan meraih keuntungan (Ufen, [2006](#)). Literatur oligarki sejalan dengan pandangan ini bahwa politik Indonesia saat ini semakin didorong oleh logika politik uang (Fukuoka, [2013](#)).

Seperti yang dicatat Hadiz, sekarang menjadi diterima secara luas bahwa "calon-calon untuk jabatan politik perlu memberikan pembayaran besar kepada pejabat partai di berbagai tingkat" untuk memastikan pencalonan. Dalam pemilu 2004, misalnya, PDI-P membebaskan individu antara Rp200.000.000 hingga Rp300.000.000 untuk dimasukkan dalam daftar resmi calon untuk kursi parlemen provinsi dan Rp400.000.000 untuk kursi parlemen nasional (Hadiz, [2010](#)). Ada banyak kesempatan ketika calon dipilih semata-mata berdasarkan kekayaan finansial mereka. Hal ini berbeda dengan tahun 1950-an, ketika partai-partai Indonesia lebih terlibat dalam perdebatan ideologis dan kebijakan serta lebih sedikit bergantung pada uang dan intimidasi fisik (Fealy, [2001](#)). Penting untuk diingat bahwa pemilu pada tahun 1955 ditandai oleh "betapa sedikitnya penekanan pada uang" (Anderson, [1996](#)).

Naiknya oligarki sejalan dengan semakin eksklusifnya proses pemilu. Karena uang kini memainkan peran krusial dalam pemilu, proses pemilu telah menciptakan 'bias bisnis' yang efektif memarginalkan pemimpin masyarakat sipil yang memiliki potensi menjadi politisi efektif namun kurang memiliki sarana keuangan untuk mengikuti pemilu yang semakin mahal. Akibatnya, rakyat biasa terus dihalangi dari berperan penting dalam cara negara ini dikelola. Dalam demokrasi baru Indonesia, persaingan pemilu menjadi sarana utama bagi oligarki untuk mendapatkan akses ke mesin negara dan membagi-bagi rampasan di antara mereka. Menurut Winters, ketahanan oligarki dalam era demokrasi

bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena "tidak ada pembatas yang hampir dibangun ke dalam demokrasi pemilu yang dapat secara efektif membatasi bentuk-bentuk kekuatan material yang digunakan oleh oligarki" (Winters, [2011](#)).

Secara keseluruhan, dinamika politik Indonesia saat ini tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada oligarki, terutama elite bisnis yang telah membangun aset ekonomi independen dari negara. Lebih penting lagi, intensifikasi politik uang dan marginalisasi kepentingan masyarakat sipil akibatnya bukanlah gejala tumbuhnya demokrasi liberal yang belum dewasa. Seperti yang diuraikan oleh Robison dan Hadiz, mereka mendasari logika 'sesuatu yang lain' yang semakin tertanam. Jika ada kesimpulan umum yang bisa diambil dari karya-karya yang ditinjau dalam artikel ini, maka 'sesuatu yang lain' ini mungkin merupakan bentuk 'demokrasi oligarkis'. Ini adalah sistem yang ditandai oleh sinergi antara oligarki dan demokrasi formal (bukan substantif). Di Indonesia, oligarki tidak berhasil diatasi oleh demokrasi; sebaliknya, institusi formal demokrasi diambil alih oleh oligarki untuk selanjutnya mengeksploitasi kapasitas distribusi partikularistik negara patrimonial (Robinson & Hadiz, [2004](#)).

Dalam konteks ini, stabilitas politik Indonesia sangat tergantung pada peredaran patronase yang stabil di antara elite-elite oligarki. Presiden keenam dan sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terbukti sangat mahir dalam hal ini. Sementara mengklaim untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang dihadapi negara, seperti pemberantasan korupsi, pemerintahan SBY tidak pernah mengejar reformasi radikal yang akan menggoyahkan proses akumulasi kekayaan oleh oligarki. Meskipun beberapa teknokrat terkemuka yang berkomitmen untuk reformasi ekonomi liberal, seperti Sri Mulyani Indrawati dan Marie Pangestu, diangkat ke posisi strategis (Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, masing-masing), mereka selalu diabaikan ketika reformasi mereka mengancam kepentingan oligarki. SBY tampaknya menyadari bahwa kegagalan untuk tetap memperhatikan kepentingan oligarki berakibat serius, seperti yang ditunjukkan oleh presiden keempat, Abdurrahman Wahid, yang perilakunya yang tidak menentu menggoyahkan kepentingan oligarki, yang kemudian menyebabkan pemakzulannya (Slater, [2004](#)).

Akhirnya, dengan fokusnya pada hubungan kekuasaan dalam politik Indonesia saat ini, literatur oligarki dengan jelas menolak gagasan bahwa 'tata kelola yang baik' dapat dicapai melalui implementasi bentuk dan kecepatan reformasi institusi yang paling tepat, yang umum di antara komunitas pendonor internasional. Memang, Hadiz mengkritik pandangan yang dipolitisasi tentang reformasi tata kelola dan sebaliknya menyarankan bahwa 'pembuatan kebijakan secara fundamental dibentuk oleh persaingan antara kepentingan yang bersaing, hasilnya sangat mencerminkan mode distribusi kekuatan dalam negara dan masyarakat'. Negara patrimonial Indonesia tidak mungkin mendorong kekuatan sosial pro-demokrasi baru yang mampu mendorong perubahan dari dalam. Pertama, ada sedikit insentif bagi oligarki untuk mendorong pemerintahan yang lebih liberal. Selain itu, belum ada kekuatan sosial pengimbang lain yang muncul untuk menantang dominasi oligarki yang telah berlangsung lama (Hadiz, [2010](#)). Dilihat dari sudut pandang ini, kemungkinan peralihan menuju demokrasi liberal yang berarti tidak mungkin terjadi. Sebagai gantinya, kita kemungkinan akan melihat konsolidasi lebih lanjut dari demokrasi oligarkis di mana kekuatan masyarakat sipil terus mengalami marginalisasi. Dalam konteks ini, kemungkinan reformasi yang disponsori oleh donor internasional akan terus menghasilkan hasil yang mengecewakan.

Kemunduran Demokrasi Indonesia(?)

Indonesia mengalami transisi dari sistem politik otoriter menjadi demokratis, yang pada awalnya menunjukkan perkembangan menuju konsolidasi demokrasi. Namun, dalam perjalanan proses tersebut, terjadi banyak masalah yang mempengaruhi kualitas demokrasi di negara ini. Salah satu isu krusial adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Korupsi telah merongrong fondasi demokrasi dengan cara menggerus prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Praktik korupsi ini memperkuat bentuk demokrasi patrimonial, di mana kelompok-kelompok tertentu, termasuk elite politik dan bisnis, menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, daripada untuk kepentingan publik. Webber berargumen bahwa Indonesia telah bertransisi dari sistem politik otoriter menjadi demokratis, mengembangkan banyak atribut dari konsolidasi demokrasi, tetapi korupsi yang merajalela telah menyebabkan demokrasi patrimonial dengan hukum yang lemah dan kapasitas pemerintahan terbatas; namun, ada tanda-tanda pertumbuhan bahwa persaingan pemilu akan mendorong demokrasi Indonesia ke arah yang lebih liberal (Webber, [2006](#)).

Dampak buruk korupsi ini juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi demokrasi. Rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses politik, mengurangi legitimasi demokrasi, dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik bahkan resesi demokratisasi. Menurut Warburton & Aspinall, Indonesia adalah sebuah demokrasi yang kurang liberal, dan berargumen bahwa sejumlah

kekuatan struktural, agensial, dan populer telah menyebabkan penurunan bertahap dalam kualitas demokrasi (Warburton & Aspinall, 2008). Lebih lanjut menurut Hadiz, Indonesia sejak 2017 telah mengalami kemunduran demokrasi yang unik akibat *mainstream*-nya moralitas Islam konservatif dan hiper-nasionalisme reaksioner dalam wacana politik, yang kemungkinan akan terus berlanjut dan menonjolkan fitur iliberal (semu) dalam demokrasi Indonesia (Hadiz, 2017). Thomas P. Power secara gamblang mengklaim bahwa sejak era Presiden Joko Widodo, telah terjadi penurunan kualitas demokrasi Indonesia, terkait dengan terus berkembangnya dan melegitimasi paham politik Islam konservatif dan anti-pluralistik; manipulasi partai terhadap institusi negara kunci; serta semakin terbukanya represi dan pembungkaman terhadap oposisi politik. Menurutnya hal ini adalah sebuah resesi demokrasi yang nyata (Power, 2018). Aspinall dan Warburton menambahi bahwa meskipun Indonesia telah diakui memiliki stabilitas demokrasi selama dekade terakhir, ada tanda-tanda baru tentang kerapuhan dan kemungkinan kemerosotan demokrasi di masa depan, seperti munculnya politik populistik yang xenophobia dan reaksioner, serta arah iliberal dalam regulasi kebebasan sipil (Aspinall & Warburton, 2018).

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan elite politik. Masyarakat harus berjuang untuk nilai-nilai demokrasi, memerangi korupsi, dan berperan aktif dalam pembentukan kebijakan publik. Selain itu, perlu diakui bahwa Indonesia adalah sebuah demokrasi yang kurang liberal, dan perlu diwaspadai kemungkinan adanya penurunan bertahap dalam kualitas demokrasi. Isu-isu seperti *mainstream*-nya moralitas Islam konservatif dan hiper-nasionalisme reaksioner, serta arah illiberal dalam regulasi kebebasan sipil, harus diatasi secara kritis dan tanpa kompromi untuk mencapai demokrasi yang sejati dan berkualitas di Indonesia.

SIMPULAN

Artikel ini telah meninjau literatur tentang oligarki di Indonesia khususnya riset Yuki Fukuoka yang menawarkan interpretasi yang berbeda tentang transisi politik Indonesia. Berbeda dengan pandangan umum, riset ini tidak melihat transisi politik di Indonesia sebagai perjalanan menuju demokrasi liberal. Sebaliknya, literatur oligarki menempatkan Indonesia saat ini dalam konteks konsolidasi tipe demokrasi yang iliberal: demokrasi oligarkis. Literatur oligarki juga menantang interpretasi liberal umum tentang kejatuhan rezim Suharto karena menekankan pentingnya ketegangan dalam rezim sebagai faktor yang berkontribusi pada kejatuhan tersebut. Fokus pada proses internal rezim ini belum menerima perhatian yang cukup dalam literatur demokratisasi umum, di mana rezim sultanistik dianggap paling rentan terhadap transisi yang dipimpin oleh masyarakat. Oleh karena itu, implikasi dari pengalaman Indonesia harus dijelajahi dalam perdebatan teoretis yang lebih luas, yang dapat mengarah pada spesifikasi mode baru dari transisi dari rezim sultanistik. Indonesia telah mengalami transisi dari sistem politik otoriter menjadi demokratis, namun proses tersebut tidak sepenuhnya membawa konsolidasi demokrasi yang sejati. Masalah-masalah seperti korupsi yang merajalela telah menggerus kualitas demokrasi dengan mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini telah memperkuat bentuk demokrasi patrimonial di mana elite politik dan bisnis menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Webber menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah demokrasi yang kurang liberal dan perlu melakukan langkah-langkah kritis untuk mengatasi potensi penurunan kualitas demokrasi. Upaya melawan isu-isu seperti konservatisme Islam, reaksioner hiper-nasionalisme, dan arah illiberal dalam regulasi kebebasan sipil harus dijalankan tanpa kompromi untuk mencapai demokrasi yang kuat dan berdaya.

REFERENSI

- Anderson, B. (1996). Elections and Participation in Three Southeast Asian Countries. In R. H. Taylor (Ed.), *The Politics of Elections in Southeast Asia* (pp. 12–33). Cambridge: Cambridge University Press.
- Aspinall, E. (2004). Indonesia: Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough. In M. Alagappa (Ed.), *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space* (pp. 61–96). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford CA: Stanford University Press.
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*. <https://doi.org/10.2991/icspss-17.2018.1>.
- Baswedan, A. (2004). Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004. *Analisis CSIS*, 33(2), 173–89.
- Bratton, M., & Van de Walle, N. (1994). Neopatrimonial Regimes and Political Transition in Africa. *World Politics*, 46(4), 453–89. <https://doi.org/10.2307/2950715>.
- Case, W. (2002). *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*. London: Routledge Curzon.

- Chehabi, H. E., & Linz, J. J. (2000a). A Theory of Sultanism 1: A Type of Nondemocratic Rule. In H. E. Chehabi & J. J. Linz (Eds.), *Sultanistic Regimes* (pp. 3–25). Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.
- Chehabi, H. E., & Linz, J. J. (2000b). A Theory of Sultanism 2: Genesis and Demise of Sultanistic Regimes. In H. E. Chehabi & J. J. Linz (Eds.), *Sultanistic Regimes* (pp. 26–49). Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.
- Chua, C. (2008). *Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital*. London: Routledge.
- Crouch, H. (2010). *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Davidson, J. (2009). Dilemmas of Democratic Consolidation in Indonesia. *The Pacific Review*, 22(3), 293–310. <https://doi.org/10.1080/09512740903068354>.
- Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17.
- Fealy, C. (2001). Parties and Parliament: Serving Whose Interest? In G. Lloyd & S. Smith (Eds.), *Indonesia Today: Challenges of History* (pp. 97–111). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Fukuoka, Y. (2012a). Politics, Business, and the State in Post-Suharto Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 34(1), 80–100. <http://dx.doi.org/10.1355/cs34-1d>.
- Fukuoka, Y. (2012b). Indonesia's "Democratic Transition" Revisited: A Clientelist Model of Political Transition. *Democratization*, 20(6), 991–1013. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.669894>.
- Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and Democracy in Post-Suharto Indonesia. *Political Studies Review*, 11(1), 52–64. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00286.x>.
- Hadiz, V. R. (2003). Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-Called Democratic Transition. *The Pacific Review*, 16(4), 591–611. <https://doi.org/10.1080/0951274032000132272>.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian Perspective*. Stanford CA: Stanford University Press.
- Hadiz, V. (2017). Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53, 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>.
- Hefner, R. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- King, Y. D. (2003). *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport CT: Praeger.
- Lane, M. (2008). *Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto*. London: Verso.
- Linz, J. J. (1997). Some Thoughts on the Victory and Future of Democracy. In A. Hadenius (Ed.), *Democracy's Victory and Crisis* (pp. 404–426). Cambridge: Cambridge University Press.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-communist Europe*. Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.
- Mackie, J. (1999). Indonesia: Economic Growth and Depoliticization. In J. W. Morley (Ed.), *Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region* (pp. 123–141). Armonk NY: M. E. Sharpe.
- Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia's Party Systems of the 1950s and the Post-Suharto Era: From Centrifugal to Centripetal Inter-party Competition. *Journal of Southeast Asia Studies*, 39(3), 431–53. <https://doi.org/10.1017/S0022463408000337>.
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-reformist Elites and Resilient Civil Society. *Democratization*, 19(2), 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>.
- Moore, B. (1967). *The Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Boston MA: Beacon Press.
- Power, T.P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Rodan, G., & Jayasuriya, K. (2006). Conflict and the New Political Participation in Southeast Asia. *Murdoch University Asia Research Centre Working Paper*, 129, 1–21. https://www.researchgate.net/publication/228933057_Conflict_and_the_New_Political_Participation_in_Southeast_Asia
- Rueschemeyer, D., Stephens, E. H., & Stephens, J. D. (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago IL: University of Chicago Press.
- Santoso, A. (1997). Democratization: The Case of Indonesia's New Order. In A. Laothamatas (Ed.), *Democratization in Southeast and East Asia* (pp. 21–45). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sherlock, S. (2004). *The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand for*. Centre for Democratic Institutions, Australian National University.
- Slater, D. (2004). Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition. *Indonesia*, 78, 61–92. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1813/54328>.

- Slater, D. (2008). Democracy and Dictatorship Do Not Float Freely: Structural Sources of Political Regimes in Southeast Asia. In E. M. Kuhonta, D. Slater, & T. Vu (Eds.), *Southeast Asia in Political Science: Theory, Region, and Qualitative Analysis* (pp. 55–79). Stanford CA: Stanford University Press.
- Snyder, R. (1998). Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectives. In H. E. Chehabi & J. J. Linz (Eds.), *Sultanistic Regimes* (pp. 49–84). Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. London: Routledge.
- Ufen, A. (2006). Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and Philippinisation. *GIGA Working Papers* 37. Retrieved from <https://ideas.repec.org/p/zbw/gigawp/37.html>.
- Uhlen, A. (1997). *Indonesia and the 'Third Wave of Democratisation'*. New York: St Martin's Press.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2018). Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 41, 255-258. <https://doi.org/10.1355/cs41-2k>.
- Webber, D. (2006). A consolidated patrimonial democracy? Democratization in post-Suharto Indonesia. *Democratization*, 13(3), 396-420. <https://doi.org/10.1080/13510340600579284>.
- White, G. (2004). Civil Society, Democratization and Development: Clearing the Analytical Ground. In P. Burnell & P. Calvert (Eds.), *Civil Society in Democratization* (pp. 6–21). London: Frank Class.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.